

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Partai Hanura, yang didirikan di Indonesia pada tahun 2006 oleh Jendral TNI Purn. Wiranto, memiliki visi untuk memperjuangkan politik berbasis moral dan keadilan sosial. Di Provinsi Jambi, partai ini aktif sejak 2009 dan resmi terdaftar untuk pemilu setelah memenuhi syarat dari KPU. Hanura fokus pada isu anti-korupsi, pembangunan inklusif, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Data pemilu menunjukkan bahwa partai ini mengalami penurunan jumlah kursi yang diperoleh. Dalam pemilu 2009, Hanura meraih 5 kursi, tetapi jumlah ini menurun menjadi 3 kursi pada 2014, 2 kursi pada 2019, dan tidak memperoleh kursi pada pemilu 2024. Pada pemilu 2019, dua calon legislatif terpilih dengan jumlah suara signifikan, namun pada 2024, Hanura tidak mengisi dua daerah pemilihan, menandakan masalah dalam manajemen internal dan rekrutmen.

Daftar calon legislatif tetap untuk pemilu 2024 menunjukkan bahwa Hanura tidak memiliki calon di dua daerah pemilihan dan banyak calon memperoleh suara di bawah 500. Penurunan ini menunjukkan perlunya penelitian untuk memahami alasan hilangnya dukungan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan pemilih. Evaluasi diperlukan agar Hanura bisa bersaing lebih baik di Jambi dan Indonesia. Partai politik diperlukan untuk mencapai kekuasaan, terutama dalam legislatif.

Keberhasilan partai dalam pemilu bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Data menunjukkan bahwa Hanura tidak efektif, dengan penurunan suara yang signifikan dalam pemilu. Faktor kepemimpinan dan organisasi dianggap penting. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi pencapaian tujuan partai. Ada tiga jenis kepemimpinan: karismatik, transaksional, dan transformasional.

Proses rekrutmen anggota baru di partai juga penting untuk meningkatkan efektivitas kampanye. Analisis mencakup metode yang digunakan, seperti kampanye media atau kegiatan sosial, untuk menarik anggota baru dan bagaimana strategi-strategi ini mempengaruhi jumlah serta kualitas anggota yang bergabung.

Pendidikan politik adalah kunci bagi partai dalam menghadapi tantangan baru di dunia demokrasi modern. Pendidikan ini lebih efektif jika ditargetkan pada angkatan muda. Program pelatihan perlu mencakup nilai-nilai dasar partai, pemahaman isu politik, dan persiapan untuk kegiatan politik di dalam partai serta di parlemen. Partai harus memiliki perwakilan untuk mengembangkan program pendidikan politik yang berkelanjutan. Keterlibatan pemimpin partai dalam pendidikan politik dapat meningkatkan minat anggota. Kerja pendidikan dalam partai dirancang dengan program pelatihan yang terarah, penunjukan tim pelatihan, dan pengembangan materi yang sesuai. Pendidikan politik membantu membentuk individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2008, pendidikan politik adalah proses untuk memahami hak

dan kewajiban setiap warga negara. Program partai berfungsi sebagai identitas untuk menjelaskan prinsip dan tujuan partai kepada publik. Program ini menggambarkan nilai dan ambisi politik, serta membedakan partai dari yang lain. Program partai memiliki karakter jangka panjang dan perlu melibatkan anggota sebanyak mungkin dalam penyusunannya untuk memastikan pemahaman dan dukungan yang lebih baik.

Komunikasi politik melibatkan interaksi antara kelompok atau individu dalam konteks politik. Menurut McNair, komunikasi politik berfokus pada bagaimana sumber daya publik dialokasikan, baik itu dalam bentuk kekuasaan maupun ekonomi. Ini penting untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Contohnya, calon wakil rakyat seringkali menggunakan media massa untuk berkomunikasi dengan pemilih, bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Hofmeister dan Grabow menyoroti bagaimana partai berkomunikasi dengan anggotanya dan publik. Efektivitas komunikasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik penting untuk semua partai politik, baik dengan pemilih maupun di dalam partai itu sendiri. Hanya partai dengan komunikasi internal yang efisien yang dapat berhasil dalam komunikasi eksternal. Dalam demokrasi, komunikasi politik dan persetujuan publik sangat penting.

Konflik bisa terjadi dalam partai karena perbedaan pandangan politik dan persaingan untuk kekuasaan. Konflik ini perlu diselesaikan

dengan cara yang adil dan demokratis, sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap anggota partai harus menghormati keputusan yang diambil oleh mayoritas. Jika konflik tidak diselesaikan, akan ada risiko anggota penting meninggalkan partai, yang dapat merugikan partai.

Pembicaraan tentang konflik internal dalam Hanura muncul saat MUNAS, yang menimbulkan ketegangan antara kubu Wiranto dan Oso. Konflik ini memicu masalah dalam pengiriman daftar calon legislatif ke KPU, yang berakibat pada penurunan suara secara nasional. Akibat konflik, banyak calon legislatif potensial dari Hanura berpindah ke partai lain, membuat Hanura kehilangan caleg kompeten dan kurang diminati oleh masyarakat.

4.2 Saran

- a. Partai HANURA sebagai partai yang tercitrakan baik dan bersih harus segera memperbaiki sistem rekrutmen politiknya baik di dalam kekuasaan legislatif maupun eksekutif, atau dengan kata lain dalam hal rekrutmen caleg dan rekrutmen kepala daerah. Dalam hal itu, Partai HANURA harus mempertegas kriteria caleg dan kepala daerah dengan mengedepankan kader-kader partai yang memiliki kapabilitas dan integritas.
- b. Selanjutnya Partai HANURA dalam urusan rekrutmen politiknya baik dalam ranah kekuasaan internal, legislatif, ataupun eksekutif harus menggunakan sistem meritokrasi yang berbasis kepada prestasi, kemampuan, dan kelayakan seseorang. Artinya dalam rekrutmen

politik tidak boleh menggunakan sistem yang oligarkis, atau monarkis yang berbasis kepada kepentingan kelompok atau keluarga yang cenderung kepada nepotisme bukan prestasi, kecerdasan dan kelayakan.